

AGRIBISNIS DENGAN PENDEKATAN TERPADU

Agribusiness With Integrated Approach

Eko Murdiyanto & Darmadi

Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

The national agricultural development policy that oriented to agribusiness system faced to farmer condition in Indonesia. So, we need farmer function as one of section from "agriculture community" with big agribusinessman as a locomotif. With integrated approach farmers can be part of agribusiness sub system that can compete in the global market. In addition to the farmers can be a subject of development agribusiness system for prevent farmers more left in National development.

Keyword: agribusiness system, agribusiness community and Integrated approach.

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan pertanian nasional saat ini berorientasi pada pembangunan sistem agribisnis. Hal ini tidak mengherankan karena Bungaran Saragih sebagai Menteri Pertanian dan Perkebunan dikenal sebagai penganjur gagasan pembangunan sistem agribisnis sebagai wahana penghela utama perekonomian nasional. Anjuran itu didasarkan pada keyakinan bahwa kegiatan agribisnis dapat menjadi obat dari segala penyakit ekonomi nasional. Mulai dari kelangkaan pangan, kesempatan kerja/usaha, sampai masalah defisit neraca pembayaran dan kelangkaan devisa diyakini akan dapat diatasi melalui pembangunan sistem agribisnis.

Selain itu angka-angka statistik pada tahun 1995 menunjukkan secara keseluruhan bahwa sistem agribisnis merupakan penyumbang terbesar pada perekonomian nasional. Menurut Saragih (1995), kenyataan ini berdasar pada sumbangan sistem agribisnis dalam aspek nilai tambah (47%), penyerapan tenaga kerja (77%) dan ekspor nasional yang mencapai 49%. Apabila dibandingkan dengan angka-angka pada tahun 1990, angka-angka pada tahun 1995 tersebut menunjukkan peningkatan pada setiap aspeknya, yaitu aspek nilai tambah (2%), penyerapan tenaga kerja (3%) dan ekspor nasional (6%).

Sementara kondisi sebagian besar petani di Indonesia adalah petani kecil dengan usahatani kecil yang menghasilkan produksi dan pendapatan rendah, meskipun tidak selalu produktivitasnya rendah. Kecilnya usahatani ini dapat dilihat dari jumlah petani gurem (kurang dari 0,5 Ha) yang meliputi 50% dari rumah tangga pertanian (BPS, 1984 dalam Widodo, 1999), sehingga tidak

mengherankan bahwa kehidupan petani sangat dekat dengan batas subsistensi yang dicirikan dengan sikap mendahulukan selamat (*safety first*).

Tulisan ini bertitik tolak dari asumsi bahwa kebijakan pembangunan pertanian nasional masih melibatkan seluruh petani baik petani gurem/kecil, petani menengah maupun petani besar, meskipun kebijakan pembangunan pertanian nasional nantinya berorientasi pada pembangunan sistem agribisnis. Sementara itu usahatani yang berorientasi agribisnis merupakan usaha yang memerlukan modal dalam jumlah besar dan penuh risiko namun di sisi lain petani kecil, sebagai mayoritas petani di Indonesia, memiliki kelemahan dalam menghadapi dan memilih usahatannya. Tulisan ini memandang sistem agribisnis dari sudut sosiologis agar dalam sistem agribisnis tidak meninggalkan petani kecil dan mengikutsertakan sebagai subyek dalam sistem agribisnis, dalam suatu konsep agribisnis dengan pendekatan terpadu.

KONDISI SOSIAL EKONOMI PETANI DI INDONESIA

Sebagian Besar petani di Indonesia tergolong petani gurem atau petani kecil (memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha). Menurut BPS dalam Widodo, (1999) jumlah petani gurem di Indonesia mencapai 10.906 ribu atau 50% dari rumah tangga petani. Karakteristik petani gurem secara ekonomi adalah petani yang memiliki pendapatan rendah. Di samping itu petani gurem memiliki sifat tidak mau mengambil risiko dalam berusahatani, selain itu juga memiliki sifat mendahulukan selamat (*safety first*). Sifat mendahulukan selamat selain dimiliki petani gurem juga menjadi ciri petani menengah. Risiko dalam produksi pertanian diakibatkan oleh adanya ketergantungan aktivitas pertanian pada alam, dimana pengaruh buruk alam telah banyak mempengaruhi total hasil panen pertanian (Soekartawi, *et. al*, 1986).

Adanya risiko berproduksi sangat mempengaruhi perilaku petani dalam pengambilan keputusan. Bagi petani, pengalaman kegagalan dalam berproduksi merupakan suatu yang sangat mempengaruhi sikap dan perilakunya. Penggunaan varietas baru pernah menjadi problem utama dalam adopsi teknologi sewaktu revolusi teknologi akan dicanangkan. Menurut Just dan Pupe (1974), penggunaan pupuk dan irigasi juga mempunyai interaksi yang nyata dalam meningkatkan derajat risiko produksi pertanian, demikian juga dengan penggunaan input tenaga kerja, modal dan penggunaan pestisida. Sementara Anderson (1974), menyebutkan bahwa pengetrapan teknologi baru juga mempunyai risiko yang lebih besar daripada cara tradisional yang sudah lazim diterapkan petani. Hal ini terjadi karena teknologi baru memerlukan tambahan modal dan peralatan yang relatif besar.

Menurut Scott (1983), adanya perilaku enggan terhadap risiko di dalam pengambilan keputusan disebabkan oleh dilema ekonomi sentral yang dihadapi

oleh kebanyakan rumahtangga petani. Petani lebih dekat kepada batas subsistensi dan selalu mengakui ketidakpastian cuaca dan tuntutan-tuntutan pihak luar menyebabkan rumahtangga petani tidak banyak peluang untuk menerapkan perhitungan keuntungan maksimal dalam berusahatani. Sifat khas pada diri petani adalah berusaha menghindari kegagalan dan bukannya berusaha memperoleh keuntungan besar dengan mengambil risiko. Petani lebih mendahulukan selamat (*savety first*) dalam berusahatani daripada berusaha memperoleh keuntungan yang besar.

PENDEKATAN TERPADU

Pendekatan terpadu mencakup proses interaktif antara demografi dan sistem sosio-politik, artinya sesuai dengan program, kebijakan, pengembangan strategi peluang dalam perencanaan pembangunan. Menurut Hasibuan (1992), fokus utama pendekatan terpadu adalah :

1. Ada jaminan bahwa dalam proses pembangunan tidak ada sumberdaya manusia yang tidak dan kurang dimanfaatkan.
2. Terdapat kebijakan yang dapat mengurangi penghalang untuk memasuki pasaran kerja dan perbedaan upah
3. Mengurangi hal-hal yang menghalangi mobilitas sosial agar terjadi alokasi sumberdaya manusia dan optimalisasi produksi.

Lebih lanjut Hasibuan menyebutkan bahwa dalam pendekatan ini peranan manusia dalam proses pembangunan dipandang sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Di samping itu manusia juga bertindak sebagai penguasa dan pengambil keputusan dalam pembangunan dan sebagai pelaksana keputusan-keputusan itu dan menerima hasil dari keputusan itu.

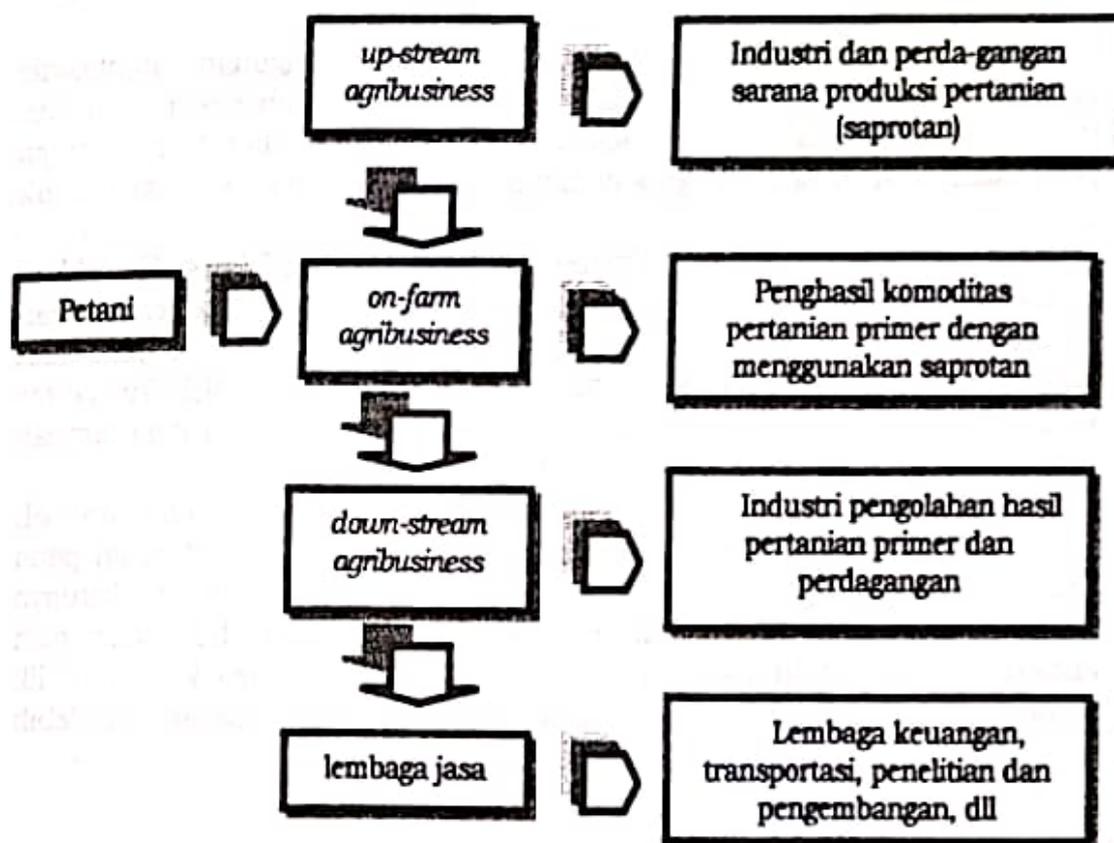
Pendekatan terpadu yang lebih berorientasi pada peranan manusia dalam pembangunan harus mempunyai prinsip:

1. Dengan bekerja dan belajar sendiri petani akan menjadi wirausaha pertanian yang mandiri
2. Perbaikan taraf hidup petani hanya bisa dilakukan dan berlangsung secara kontinyu dengan pendekatan ekonomi, dengan sedapat mungkin menghindari cara subsidi.
3. Dengan menumbuhkan cara inisiatif dan mendorong petani bekerja secara kelompok, perbaikan taraf hidup petani kecil tumbuh dari kekuatan dirinya sendiri, sedangkan pihak lain hanya sebagai fasilitator.

AGRIBISNIS

Agribisnis, seperti yang dirumuskan berama oleh Kantor Menko Ekuin dan Pusat Stusi Pembangunan (PSP), LP-IPB tahun 2000, adalah suatu sistem yang terdiri dari empat subsistem yang terintegrasi secara fungsional. Subsistem

tersebut adalah **Pertama**, agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) berupa kegiatan industri dan perdagangan sarana produksi pertanian (saprotan). **Kedua**, pertanian primer (*on-farm agribusiness*) yang menghasilkan komoditas pertanian primer dengan menggunakan saprotan. **Ketiga**, agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri pengolahan hasil pertanian primer dan perdagangan. **Keempat**, lembaga jasa (keuangan, transportasi, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain). Masing-masing subsistem tersebut saling tergantung secara fungsional, sehingga hambatan pada salah satu subsistem akan menghambat subsistem lainnya. Keterkaitan antar subsistem dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Keterkaitan Antar Subsistem dalam Agribisnis

Apabila mengacu kepada Gambar 1, secara rasional maka petani di Indonesia kemungkinan berada pada subsistem pertanian primer (*on-farm agribusiness*) saja, tidak seperti petani-petani di negara-negara maju yang tidak saja sebagai pelaku *on-farm agribusiness*, tetapi juga *down-stream agribusiness* dan lembaga jasa.

Saragih (2001), lebih rinci menguraikan bahwa membangun agribisnis berarti mengintegrasikan pembangunan pertanian, industri & jasa, sedangkan

membangun pertanian saja menyebabkan pertanian, industri & jasa saling terlepas. Membangun pertanian saja tidak mungkin mewujudkan perekonomian moderen dan berdaya saing. Oleh karena itu, membangun agribisnis berarti juga membangun ekonomi rakyat, membangun ekonomi daerah, membangun usaha kecil dan menengah, koperasi dan membangun daya saing perekonomian dan melestarikan lingkungan hidup serta membangun bangsa dan negara ini seutuhnya.

Sebagai suatu strategi pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada pengembangan sistem agribisnis adalah peningkatan keunggulan komparatif. Berdasarkan hal itu maka pembangunan agribisnis dikonsepsikan sebagai suatu proses perkembangan dengan tiga tahapan (LP-IPB dan Kantor Menko Ekuin, 2000), yaitu:

1. Agribisnis berbasis sumberdaya, dimana pembangunan agribisnis digerakkan oleh kelimpahan faktor produksi, yaitu sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berupa tenaga kerja tak terdidik. Pada tahap ini tampil ekstensifikasi agribisnis dengan dominasi komoditi primer sebagai produk akhir.
2. Agribisnis berbasis investasi, dimana pembangunan agribisnis digerakkan oleh kekuatan investasi melalui percepatan pembangunan dan pendalaman industri pengolahan dan industri hulu serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia. Produk akhir tahap ini didominasi oleh komoditas yang bersifat padat modal dan tenaga terdidik, serta memiliki nilai tambah lebih besar dan segmen pasar yang lebih luas.
3. Agribisnis berbasis inovasi, dimana pembangua agribisnis digerakkan oleh inovasi atau 'temuan baru' melalui peningkatan kemajuan teknologi pada setiap subsistem agribisnis, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pada saat bersamaan. Produk akhir tahap ini didominasi oleh komoditi yang bersifat padat ilmu pengetahuan dan tenaga kerja terdidik serta memiliki nilai tambah yang lebih besar dan pangsa pasar yang lebih luas.

PENDEKATAN TERPADU DAN AGRIBISNIS

Konsepsi agribisnis di atas menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan nasib mayoritas petani di Indonesia tergolong petani gurem atau petani kecil yang berjumlah 50%. Dalam konteks sistem agribisnis tersebut sebagian besar petani berada pada subsistem pertanian primer. Petani tersebut umumnya adalah petani subsistem dan hanya sedikit yang menjadi petani komersial, serta sangat sedikit yang dapat berkembang menjadi 'konglomerat kecil' di bidang pertanian. Petani kurang memiliki akses terhadap kegiatan agribisnis hilir dan hulu yang umumnya dikuasai pengusaha besar, sehingga petani kurang

memiliki akses terhadap nilai tambah komoditas agribisnis yang diciptakan di hulu dan hilir.

Sehubungan dengan itu nampaknya petani kita tidak akan mampu melangkah mengikuti ketiga tahap dalam sistem agribisnis tersebut. Hal ini terjadi karena untuk melangkah ke tahap dua petani harus menyediakan modal investasi yang besar. Selanjutnya untuk melangkah ke tahap tiga petani harus menyediakan modal inovasi yang lebih besar lagi. Dengan demikian proses perkembangan sistem agribisnis tiga tahap tersebut merupakan penyaringan yang cenderung meloloskan minoritas elit pemilik modal besar dan perlu diingat pola *trickle down effect* yang selama ini diterapkan tidak berjalan sama sekali, jangankan menetes ber-embun-pun tidak.

Untuk mengatasi kendala tersebut maka perlu didorong munculnya petani yang memiliki modal cukup dengan melakukan perikatan antar petani dalam konteks sosio-agraria tertentu, sehingga petani menjadi subyek dalam sistem agribisnis, artinya perlu mempertimbangkan struktur agraria petani dalam satu lokalitas tertentu. Bentuk perikatan yang dimaksud adalah menjadikan petani dalam suatu sistem yang terpadu dan terkoordinir oleh suatu perusahaan agribisnis dalam skala besar, baik BUMN maupun BUMS, sehingga petani dan perusahaan agribisnis dalam skala besar tersebut sebagai 'satu komunitas agribisnis', dimana terganggunya salah satu komunitas akan mengganggu komunitas lain. Dalam hal ini perusahaan membuka peluang berusaha bagi petani kecil dan bukan semata-mata membuka peluang kerja.

Pendekatan terpadu melibatkan petani sebagai subyek atau salah satu masukan (input) dalam agribisnis. Berdasarkan karakteristik sebagian besar petani yang subsisten maka perlu ditempuh usaha-usaha terpadu secara bertahap dengan mempertimbangkan sosial budaya masyarakat setempat, sehingga dapat ditempuh dua macam cara:

1. Bagi petani yang memiliki modal cukup untuk suatu usaha agribisnis perlu didorong untuk suatu usaha agribisnis mandiri secara koperatif dalam skala kecil. Dengan pola ini setiap rumahtangga tani yang menguasai lahan sempit tetapi memiliki modal akan mengelola suatu unit agribisnis skala kecil, sehingga tahap-tahap dalam agribisnis dapat dilakukan dalam skala kecil. Pengelolaan kegiatan agribisnis secara lokalitas tidaklah saling lepas antar satu unit agribisnis dengan unit agribisnis lainnya, tetapi terkonsolidasi dalam satu wadah yang bersifat koperatif untuk konsolidasi manajemen agribisnis. Sehingga antara satu unit agribisnis dengan unit lainnya sebagai 'satu komunitas agribisnis' yang mantap.
2. Bagi petani yang tidak memiliki modal cukup untuk suatu usaha agribisnis perlu didorong untuk suatu usaha sebagai mitra dalam agribisnis skala besar. Hubungan antara petani dengan agribisnis skala besar merupakan 'satu komunitas agribisnis'.

- a. Perusahaan besar BUMN atau BUMS perlu membuat suatu demonstrasi area pada suatu daerah yang memungkinkan untuk suatu usaha agribisnis. Lahan yang digunakan adalah lahan milik petani tertentu yang memiliki pengaruh kuat secara sosial dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar demonstrasi area tersebut dapat dijadikan contoh dengan harapan akan diikuti oleh petani secara luas.
- b. Tahap berikutnya adalah dengan menyewa lahan milik petani yang berdekatan dengan lokasi demonstrasi area dengan mengikutsertakan petani pemilik lahan sebagai tenaga kerja untuk lahannya dengan mendapat upah yang besarnya sama dengan upah setempat. Pada tahap ini secara tidak langsung petani akan mendapat bimbingan dan penyuluhan dan berada pada subsistem pertanian primer dalam agribisnis yang mantap. Maksudnya petani akan dapat melakukan sisi agronomis dalam agribisnis dengan teknologi yang sesuai, baik pengolahan lahan, pembenihan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama, sampai pada pemanenan.
- c. Pada proses penanganan pasca panen dan pemasaran dilakukan oleh agribisnis skala besar dengan mengikutsertakan petani. Hal ini dilakukan karena pada tahap ini berada pada sub sistem *down-stream agribusiness*, industri pengolahan hasil pertanian primer dan perdagangan yang dapat dilakukan secara efektif dalam skala besar. Selain itu untuk mendapatkan harga yang baik diperlukan *bargaining position* yang kuat dan agribisnis dalam skala besarlah yang memiliki *bargaining position* kuat.
- d. Petani yang menjadi mitra agribisnis skala besar akan memiliki akses ke lembaga keuangan, transportasi, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain berada pada subsistem lembaga jasa sehingga petani sebagai anggota satu komunitas agribisnis akan menjadi bagian dari kekuatan agribisnis yang kuat dan saling mendukung.

PENUTUP

Pembentukan 'suatu komunitas agribisnis' yang mengikutsertakan petani sebagai bagian dari komunitas tersebut tidak lepas dari kebiasaan dan sikap sebagian besar petani di Indonesia. Kebiasaan dan sikap petani yang cenderung memusatkan pada satu tanaman tertentu, biasanya tanaman pangan, secara turun-temurun tidak berorientasi ke pasar global. Di samping itu kurang realistis bila akan mentransformasikan secara cepat sistem pertanian tradisional (subsisten) yang sudah mendarah daging dalam masyarakat.

Melalui suatu pendekatan terpadu petani diajak untuk mengubah pandangannya dengan menjadi bagian dari subagribisnis untuk dapat bersaing

dalam pasaran global. Selain itu dengan menjadikan petani sebagai bagian yang tidak boleh ditinggalkan dalam pembangunan sistem agribisnis adalah untuk menghindarkan adanya 'pemberontakan' oleh kaum tani yang selama kurang lebih 30 tahun pada masa pembangunan yang silam selalu tertinggal (ditinggal) di belakang. Pada akhirnya akan menghindarkan petani-petani, yang berarti mayoritas penduduk Indonesia, terkubur dalam kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, JR .1974. Risk Efficiency Interpretation Agricultural Production research. *Economic* 42 (3).
- Scott, JC. 1983. *Moral Ekonomi Petani*. LP3ES. Jakarta
- Hasibuan, Sayuti. 1992. *Sumber Daya Manusia dan Model Pemecahan Masalah. Pedoman Pelatihan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tingkat Propinsi*. Jakarta. BAPPENAS.
- Saragih, Bungaran. 2001. *Suara dari Bogor (Membangun Sistem Agribisnis)*. Yayasan ESES. Jakarta.
- Sitorus, MT Felix. 2000. Agribisnis berbasis Komunitas. *Suara Pembaruan*. 7 Oktober.
- Soekartawi, A Soehardjo, Dillon JI and Hardaker JB. 1986. *Ilmu Usahatani & Pengembangan Untuk Petani Kecil*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekartawi. 1991. *Agribisnis, Teori dan Aplikasinya*. Universitas Brawijaya, Rajawali Pres. Jakarta
- Widodo, S. 1999. Peberdayaan Pertanian Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*. Aditya Media. Yogyakarta.